



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISTRI WIDODO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 416318

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 682.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 436.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.713.175.362

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.855.175.362

III. HUTANG Rp. 271.428.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.583.747.362

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : TOMI ADI PURNOMO
- Jabatan : SEKRETARIS
- NHK : 735847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/280 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/222 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 57.500.000

- MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, HONDA NF125D Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 43.500.000

Sub Total Rp. 2.296.000.000

III. HUTANG Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.176.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : HARNI MUNASIH
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- NHK : 742223

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.500.000

- MOTOR, HONDA NF125 TD MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE 1.2L GLX (4X2) MT Tahun 2013, LAINNYA Rp. 75.000.000
- MOTOR, HONDA F1CO2N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.132.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.899.600**F. HARTA LAINNYA** Rp. 10.500.000**Sub Total** Rp. 535.031.600**III. HUTANG** Rp. 252.151.550**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 282.880.050

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : ENY SULISTIARINI
- Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
- NHK : 742484

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/120 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI		Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI		Rp. 100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	79.000.000
1. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI		Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2008, HASIL SENDIRI		Rp. 75.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.438.524
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	551.938.524
III. HUTANG	Rp.	172.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	379.938.524

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIRA EKAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
3. NHK : 741430

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR SOLO MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 28.500.000

Sub Total Rp. 620.500.000

III. HUTANG Rp. ----

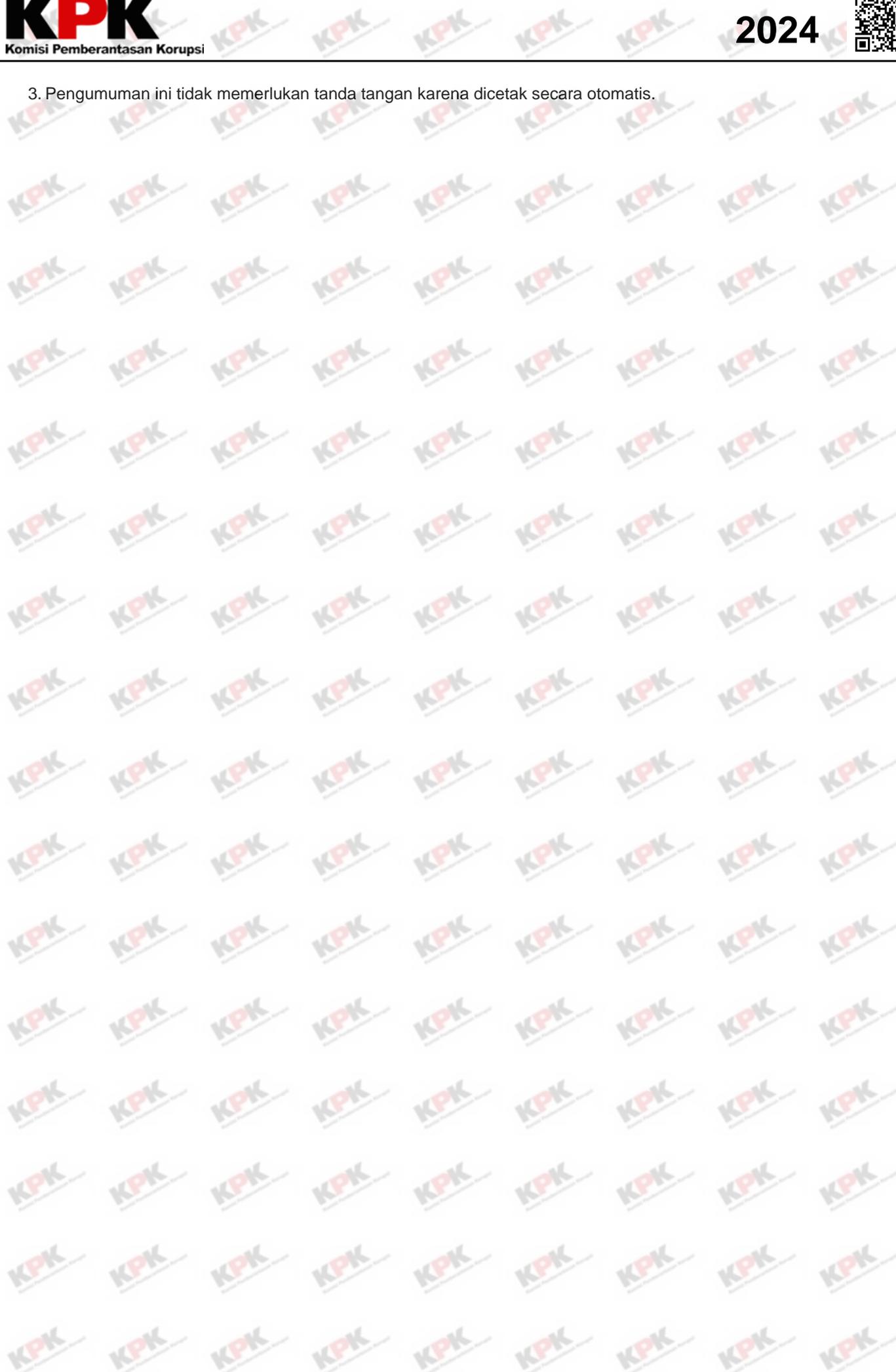
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 620.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : I.G.A GANGGA SARI
- Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I
- NHK : 739513

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/180 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

- MOTOR, HONDA X1H02N35MI/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
- MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 64.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.966.150

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 704.966.150

III. HUTANG Rp. 25.193.740

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 679.772.410

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI WULANSARI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
3. NHK : 742047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m2/270 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 238.300.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2011, HADIAH Rp. 2.300.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G DSL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MPNP/MINIBUS Tahun 2013, WARISAN Rp. 70.000.000
5. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.540.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 910.840.000

III. HUTANG Rp. 500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 910.340.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : TRI KURNIAWAN ENDAH SURYANI
- Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III
- NHK : 773309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	75.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI GRANDIS Tahun 2005, HASIL SENDIRI	Rp.	
75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	754.207
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	90.754.207
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	90.754.207

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : ARIEF CHOTBANI
- Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV
- NHK : 742401

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/250 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/36 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.500.000

- MOBIL, SUZUKI MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
- MOTOR, SANEX SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.948.603

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.348.448.603

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.348.448.603



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

- Nama : DWI ARIEF SETIAWAN
- Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
- NHK : 760266

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 125.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.500.000

- MOBIL, DAIHATZU TERIOS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- MOTOR, YAMAHA MATIC /AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 286.000.000

III. HUTANG Rp. 128.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 157.700.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

